



ANALISIS KEBIJAKAN ANGGARAN BERBASIS AKREDITASI DI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KENDARI

POLICY ANALYSIS OF BUDGETTING BASED ON ACCREDITATION AT THE STATE ISLAMIC INSTITUTE OF KENDARI

Naskah diterima: 19 April 2024 | Revisi: 19 April – 20 Juni 2024 | Disetujui: 21 Juni 2024

**Nasrullah
Sulaiman**

Institut Agama Islam
Negeri Kendari

Email:
nasrullahsulaiman83@
gmail.com

Abstrak

Policy paper ini menguraikan masalah kebijakan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari bahwa perguruan tinggi dihadapkan pada desakan untuk meningkatkan mutu dan daya saing, termasuk melalui peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Sementara pengelolaan anggaran yang berfokus pada akreditasi menjadi strategi penting dalam mendukung upaya tersebut. Dengan mengalokasikan sumber daya dengan cermat untuk mendukung kegiatan yang mendukung pencapaian standar akreditasi, perguruan tinggi dapat menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan dana yang dimiliki. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan pada studi pustaka, di mana penulis banyak merujuk pada data dan sumber primer dan sekunder yang ada. Hasilnya menunjukkan bahwa tantangan utama dalam pengelolaan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari adalah kurangnya kerangka regulasi yang mengatur proses pengusulan anggaran berorientasi pada peningkatan akreditasi. Tanpa panduan yang jelas, alokasi dana untuk mendukung peningkatan akreditasi dapat menjadi tidak terarah dan kurang efektif. Dengan demikian penulis merekomendasikan bahwa untuk memastikan keberhasilan kebijakan pengelolaan anggaran berbasis akreditasi, langkah-langkah konkret diperlukan, seperti sinergi dengan indikator kinerja utama institusi, pembuatan regulasi yang jelas, keterlibatan aktif Lembaga Penjaminan Mutu, peningkatan kesadaran dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Kebijakan Anggaran; Regulasi; Akreditasi; Perguruan Tinggi; IAIN Kendari

Abstract

This policy paper describes the problem of accreditation-based budget policy at IAIN Kendari, namely that universities are faced with pressure to improve quality and competitiveness, including through increasing the accreditation of study programs and institutions. Meanwhile, budget management that focuses on accreditation is an important strategy to support these efforts. By carefully allocating resources to support activities that support the achievement of accreditation standards, universities can ensure the efficient and effective use of their funds. This article uses a qualitative method with a literature study approach, where the author refers extensively to existing primary and secondary data and sources. The results show that the main challenge in accreditation-based budget management at IAIN Kendari is the lack of a regulatory framework that regulates the budget proposal process oriented towards increasing accreditation. Without clear guidance, the allocation of funds to support increased accreditation can be undirected and less effective. Thus, the author recommends that to ensure the success of an accreditation-based budget management policy, concrete steps are needed, such as synergy with the institution's main performance indicators, making clear regulations, active involvement of Quality Assurance Institutions, increasing awareness and training, as well as ongoing monitoring and evaluation.

Keywords: Budget Policy; Regulation; Accreditation; College; IAIN Kendari

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam bidang pendidikan, kebijakan diberlakukan untuk membangun dunia pendidikan agar menghasilkan pengelolaan pendidikan yang berkualitas dan prospektif (Arifin et.al., 2018). Kasus di Indonesia, pendidikan masih stagnan karena proses penyelenggaraannya dianggap tidak mampu menghasilkan *output* yang baik dan berkualitas. Secara faktual, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, salah satu penentunya adalah kebijakan yang benar (Hadi, 2016).

Pendidikan tinggi merupakan pilar penting dalam pembangunan suatu negara. Kualitas pendidikan tinggi menjadi kunci keberhasilan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kompeten, dan berdaya saing. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan tinggi, banyak negara, termasuk Indonesia, telah menerapkan sistem akreditasi sebagai alat untuk menilai dan memastikan standar mutu program studi dan institusi pendidikan tinggi. Akreditasi ini berfungsi sebagai jaminan kualitas dan kepastian bagi masyarakat, calon mahasiswa, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap program studi atau institusi yang mereka pilih (Indri Febrianti, 2023).

Di Indonesia, sistem akreditasi telah lama diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan mutu pendidikan tinggi. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan akreditasi ini. Salah satu tahapan penting dalam proses akreditasi adalah pengusulan program kerja oleh fakultas, lembaga, dan unit kampus. Pengusulan program kerja

ini merupakan bagian integral dalam upaya untuk memenuhi standar akreditasi yang ditetapkan oleh BAN-PT.

Namun dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengusulan program kerja berbasis akreditasi seringkali menghadapi berbagai kendala dan tantangan (Yulianingsih, 2016). Salah satu kendala utama yang sering terjadi adalah ketiadaan regulasi yang jelas dan komprehensif yang menjadi pedoman dalam proses pengusulan program kerja.

Tanpa adanya pedoman yang jelas, fakultas, lembaga, dan unit kampus akan mengalami kesulitan dalam menyusun usulan program kerja yang sesuai dengan kriteria akreditasi yang ditetapkan. Kurangnya pemahaman tentang proses pengusulan program kerja berbasis akreditasi juga menjadi kendala yang signifikan.

Para *stakeholders*, termasuk dosen, staf administrasi, dan pimpinan unit-unit akademik, mungkin membutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pengusulan program kerja yang berkualitas dan sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku.

Selain itu, kurangnya dukungan dan fasilitas yang memadai juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Terdapat keterbatasan sumber daya manusia, teknologi informasi, dan infrastruktur yang diperlukan untuk menyusun dan mengusulkan program kerja yang berkualitas di beberapa unit-unit kampus. Tantangan administratif lainnya, seperti: proses koordinasi antarunit, pemantauan, dan evaluasi yang terkait dengan pengusulan program kerja, juga dapat mengganggu efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

Dengan demikian, maka menjadi hal yang logis, jika pimpinan IAIN Kendari menerapkan “kebijakan anggaran berbasis akreditasi”. Hal tersebut dikarenakan, selain untuk memberikan jaminan kualitas tata kelola lembaga yang baik, juga untuk memenuhi salah satu syarat jika IAIN Kendari ingin beralih status menjadi universitas, yaitu minimal harus memiliki 2 (dua) program studi yang memperoleh predikat akreditasi “Unggul”. Begitupula jika IAIN Kendari ingin memperoleh predikat akreditasi “Unggul” tingkat institut (Akreditasi Institut Perguruan Tinggi) maka minimal 60% atau 14 dari 23 program studi yang ada harus berakreditasi “Unggul”.

Namun kebijakan anggaran IAIN Kendari ini akan menghadapi kendala signifikan pada tahap implementasinya. Salah satu kendala utamanya adalah kurangnya regulasi yang jelas dan komprehensif terkait dengan proses pengusulan program kerja berbasis akreditasi. Sehingga pihak fakultas, lembaga, dan unit kampus akan mengalami kesulitan dalam menyusun usulan program kerja yang sesuai dengan kriteria akreditasi yang ditetapkan.

Di sisi lain, ketika ketidaktersediaan regulasi yang memadai di IAIN Kendari, maka akan menyebabkan ketidakpastian dalam proses pengusulan program kerja dan evaluasi kelayakan akreditasi. Selain itu, kurangnya pemahaman tentang proses pengusulan program kerja berbasis akreditasi juga menjadi kendala yang signifikan. Dengan demikian, para pihak-pihak terkait, seperti: dosen, staf administrasi, dan pimpinan unit-unit akademik membutuhkan pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif tentang pentingnya pengusulan program kerja yang berkualitas dan sesuai dengan standar akreditasi yang berlaku.

Berbagai upaya dukungan berupa fasilitas yang lebih memadai agar tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini. Namun hasil pengamatan penulis, belum adanya regulasi yang menjadi dasar kebijakan ini serta terutama ketiadaan Petunjuk Teknis (Juknis) dan tantangan administratif lainnya, seperti proses koordinasi antarunit, monitoring, dan evaluasi yang terkait dengan pengusulan program kerja lebih cenderung menjadi penghambat tercapainya efektivitas pelaksanaan kebijakan ini.

Identifikasi Masalah

1. Keterkaitan penggunaan anggaran dengan indikator kinerja berbasis akreditasi
Ketidakjelasan kaitan penggunaan anggaran dengan indikator penilaian akreditasi, karena kurangnya kejelasan dalam menghubungkan alokasi anggaran dengan indikator kinerja yang diukur dalam proses akreditasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam menilai efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target akreditasi.
Penggunaan anggaran yang efektif dalam kaitannya dengan indikator kinerja berbasis akreditasi sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan benar-benar berkontribusi terhadap peningkatan kualitas dan standar yang diukur oleh proses akreditasi. Ketidakjelasan dalam menghubungkan anggaran dengan indikator akreditasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor berikut:
 - a. Indikator kinerja berbasis akreditasi sering kali kompleks dan memerlukan pemahaman

- yang mendalam tentang standar dan kriteria yang ditetapkan oleh badan akreditasi. Jika pemangku kepentingan tidak memahami dengan baik indikator-indikator ini, mereka mungkin kesulitan dalam merencanakan dan mengalokasikan anggaran secara tepat;
- b. Perencanaan anggaran tidak didasarkan pada analisis yang cermat tentang kebutuhan yang terkait dengan indikator akreditasi, alokasi dana bisa tidak sesuai dengan kebutuhan yang sebenarnya. Misalnya, alokasi anggaran yang berlebihan untuk fasilitas fisik tetapi kurang untuk pelatihan dan pengembangan staf dapat menghambat pencapaian akreditasi;
 - c. Mekanisme monitoring dan evaluasi yang kurang efektif berdampak padakesulitan untuk menilai bagaimana penggunaan anggaran mempengaruhi pencapaian indikator akreditasi. Monitoring yang lemah membuat sulit untuk mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau pengalihan sumber daya;
 - d. Minimnya data yang akurat dan tepat waktu mengenai penggunaan anggaran dan kinerja akreditasi membuat sulit untuk menganalisis keterkaitan antara keduanya. Data yang terbatas juga menyulitkan dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan bukti (*evidence-based decision making*).
2. Mekanisme alokasi anggaran yang belum optimal, karena masih terkesan kaku dan kurang fleksibel dalam merespons kebutuhan program studi dan fakultas yang berbeda-beda. Di mana distribusi anggaran belum mempertimbangkan kesenjangan kualitas dan kinerja program studi secara memadai.
 3. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, karena proses penyusunan dan penetapan anggaran kurang transparan dan tidak melibatkan pemangku kepentingan secara optimal. Hal ini terjadi akibat minimnya akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, sehingga sulit untuk melacak dan mengevaluasi efektivitasnya.
 4. Lemahnya kapasitas SDM dalam pengelolaan anggaran berbasis akreditasi, karena kurangnya pemahaman dan kompetensi SDM dalam mengelola anggaran berbasis akreditasi. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam merumuskan strategi dan program yang tepat untuk mencapai target akreditasi.
 5. Kurangnya sinergi antarunit kerja, karena kurangnya koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam proses penyusunan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran berbasis akreditasi. Hal ini menyebabkan inefisiensi dan tumpang tindih dalam penggunaan sumber daya.
 6. Data dan informasi terkait indikator akreditasi dan kinerja program studi belum akurat dan lengkap. Hal ini menyulitkan dalam melakukan analisis dan evaluasi efektivitas kebijakan anggaran.
 7. Sistem monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan anggaran berbasis akreditasi belum berjalan dengan

baik. Hal ini menyebabkan sulit untuk mengetahui efektivitas kebijakan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.

Dampak dari permasalahan di atas adalah:

- Terhambatnya pencapaian target akreditasi IAIN Kendari.
- Inefisiensi dan inefektivitas penggunaan anggaran.
- Rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan.
- Menurunnya motivasi dan kinerja dosen dan staf.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam *policy paper* ini adalah kurangnya dasar regulasi yang mengatur pengusulan anggaran yang berorientasi pada peningkatan akreditasi di IAIN Kendari, baik berupa Surat Keputusan Rektor, pedoman, petunjuk teknis, atau regulasi lainnya yang secara jelas mengatur pengusulan anggaran berbasis akreditasi.

Kurangnya dasar regulasi di atas menyebabkan proses pengusulan anggaran cenderung tidak terstruktur dan tidak konsisten. Selama ini, pengusulan anggaran di IAIN Kendari dilakukan melalui rapat kerja dan pengusulan Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Lembaga (RKAKL) oleh setiap fakultas, lembaga, dan unit kampus berdasarkan hasil rapat kerja internal masing-masing fakultas, lembaga, dan antarkampus.

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk mendeskripsikan informasi tentang: 1) kondisi implementasi kebijakan anggaran

berbasis akreditasi di IAIN Kendari. 2) Menawarkan berbagai alternatif yang dapat dilakukan oleh pimpinan IAIN Kendari untuk mengefektifkan implementasi kebijakan anggaran berbasis akreditasi.

Adapun manfaat penulisan *policy paper* tentang kebijakan penyusunan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari ini menawarkan manfaat yang signifikan bagi lembaga IAIN Kendari secara khusus serta bagi pengembangan sistem pendidikan tinggi secara lebih luas, baik dari perspektif teoritis maupun praktis. *Pertama*, manfaat teoritis adalah:

1. Pengintegrasian teori dan praktik: Kebijakan ini menghubungkan teori tentang manajemen keuangan dengan praktik akreditasi pendidikan tinggi. Dengan demikian, IAIN Kendari dapat menjadi laboratorium bagi pengujian konsep-konsep teoritis dalam konteks yang nyata;
2. Mengoptimalkan penggunaan sumber daya: Teori akreditasi menekankan pentingnya penggunaan sumber daya secara efisien dan efektif. Penyusunan anggaran yang berbasis akreditasi akan memaksa lembaga untuk lebih memperhatikan alokasi anggaran pada area-area yang mendukung peningkatan kualitas, seperti: penelitian, pengembangan kurikulum, dan fasilitas belajar-mengajar;
3. Peningkatan akuntabilitas: Konsep akreditasi menyiratkan tanggung jawab dan akuntabilitas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses pendidikan. Penyusunan anggaran yang terkait dengan akreditasi akan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban institusi terhadap pemangku kepentingan.

4. Peningkatan kualitas tata kelola penganggaran: Teori manajemen kualitas menekankan perlunya pengukuran dan pemantauan secara terus-menerus untuk meningkatkan kinerja. Dengan mempertimbangkan standar-standar akreditasi dalam penyusunan anggaran, IAIN Kendari dapat secara konsisten mengevaluasi dan meningkatkan mutu layanan pendidikan yang diberikan.
5. Pembaruan kebijakan publik: Praktik akreditasi dalam penyusunan anggaran dapat memberikan sumbangan yang berharga bagi pembaruan kebijakan publik dalam sektor pendidikan tinggi. Pengalaman dan hasil yang diperoleh dari implementasi kebijakan ini dapat menjadi landasan untuk penyusunan kebijakan yang lebih efektif dan relevan di masa depan.
3. Meningkatkan daya saing: IAIN Kendari yang diakreditasi dengan baik memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar pendidikan tinggi. Dengan menyusun anggaran yang mendukung pemeliharaan dan peningkatan kualitas, lembaga dapat memperkuat posisinya dalam persaingan untuk menarik mahasiswa, dosen, dan sumber daya lainnya;
4. Meningkatkan akses terhadap sumber daya: Dengan peningkatan reputasi dan kualitas, IAIN Kendari dapat lebih mudah mengakses sumber daya tambahan, baik dalam bentuk dana maupun kolaborasi dengan lembaga atau organisasi lain. Ini akan memperkaya pengalaman belajar mahasiswa dan meningkatkan kapasitas institusi dalam menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas.

Kedua, manfaat praktis, yaitu:

1. Peningkatan ketersediaan dana: Anggaran berbasis akreditasi dapat membantu IAIN Kendari dalam memperoleh sumber daya finansial yang lebih memadai. Kualitas akademik yang lebih tinggi, yang diindikasikan oleh akreditasi yang baik, dapat meningkatkan daya tarik lembaga bagi pemerintah dan donatur untuk memberikan dana;
2. Pengelolaan risiko yang lebih baik: Dengan mempertimbangkan kriteria akreditasi dalam penyusunan anggaran, lembaga dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko-risiko yang terkait dengan kepatuhan terhadap standar kualitas pendidikan. Ini termasuk investasi pada pengembangan staf pengajar, perbaikan infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya;

Dengan mempertimbangkan manfaat teoritis dan praktis di atas, kebijakan penyusunan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari dapat menjadi langkah yang cerdas dalam meningkatkan kualitas dan daya saing institusi dalam peta pendidikan tinggi nasional maupun internasional. Sebagai sebuah lembaga pendidikan, IAIN Kendari harus terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan terkini untuk memastikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi mahasiswa dan masyarakat secara umum.

Kerangka Berpikir

Dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang sederhana, karena melibatkan beragam masalah yang kompleks, tidak hanya terkait dengan aspek teknis, tetapi juga menyangkut berbagai

persoalan lainnya, seperti: perencanaan, pendanaan, serta efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem Pendidikan (Ariani, 2017). Untuk mencapai pendidikan yang bermutu, diperlukan pengelolaan yang komprehensif dan profesional terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Salah satu aspek yang penting dalam pengelolaan sumber daya tersebut adalah masalah keuangan.

Dalam konteks ini, keuangan menjadi kunci dalam menyediakan dana yang dibutuhkan oleh perguruan tinggi untuk menjalankan kegiatan operasional sehari-hari. Perguruan tinggi harus dapat memastikan ketersediaan dana guna mendukung pelaksanaan tri dharma dan terus-menerus meningkatkan kualitas lembaga tersebut (Frinosta et.al., 2021).

Segala upaya yang dilakukan dalam mengumpulkan dana harus sesuai dengan visi, misi, dan karakteristik perguruan tinggi sebagai lembaga yang tidak mencari laba dan mematuhi segala peraturan yang berlaku (Jaenuddin et.al., 2022).

Perguruan tinggi Islam di Indonesia memiliki peran penting dalam menyediakan pendidikan tinggi yang berbasis nilai-nilai keagamaan dan budaya Islam. Dalam mengelola anggarannya, perguruan tinggi ini dihadapkan pada berbagai tantangan dan kebutuhan khusus yang berkaitan dengan karakteristik lembaga pendidikan mereka. Analisis kebijakan pengelolaan anggaran di perguruan tinggi Islam Indonesia menyoroti sejumlah aspek, mulai dari:

1. Sumber pendanaan

Perguruan tinggi Islam umumnya bergantung pada beberapa sumber pendanaan utama, yaitu:

- a. Dana dari pemerintah, dimanasebagian besar perguruan tinggi Islam menerima dana dari pemerintah melalui berbagai program subsidi dan bantuan operasional;
- b. Zakat, wakaf, dan dana keagamaan lainnya. Beberapa perguruan tinggi mengandalkan dana dari zakat, wakaf, dan sumbangan keagamaan lainnya untuk mendukung operasional dan pengembangan lembaga;
- c. Biaya pendidikan dan kontribusi mahasiswa. Sebagian dana juga berasal dari biaya pendidikan yang dibayarkan oleh mahasiswa serta sumbangan sukarela dari alumni dan pihak lain.

2. Alokasi anggaran:

Alokasi anggaran di perguruan tinggi Islam cenderung mencerminkan nilai-nilai dan prioritas yang terkait dengan identitas keagamaan lembaga tersebut. Beberapa area yang mungkin mendapat prioritas dalam alokasi anggaran meliputi:

- a. Pengembangan kurikulum dan kegiatan akademik yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam;
- b. Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas ibadah, seperti: masjid, mushalla, dan sarana keagamaan lainnya;
- c. Program-program pengembangan kepribadian dan spiritual mahasiswa;
- d. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang relevan dengan Islam dan kebutuhan masyarakat Muslim.

3. Manajemen anggaran

Manajemen anggaran di perguruan tinggi Islam perlu memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Hal ini termasuk:

- a. Penyusunan anggaran yang terukur dan terperinci, dengan memperhitungkan semua sumber pendapatan dan pengeluaran yang terkait;
- b. Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa yang transparan dan sesuai dengan regulasi yang berlaku;
- c. Pengawasan dan evaluasi penggunaan dana secara berkala untuk memastikan efisiensi dan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

4. Tantangan dan kendala

Tantangan dalam pengelolaan anggaran di perguruan tinggi Islam termasuk:

- a. Keterbatasan sumber daya finansial, terutama bagi perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber pendanaan yang memadai dari pemerintah atau donator;
- b. Kompleksitas regulasi dan persyaratan administratif dalam pengelolaan anggaran, yang dapat membebani lembaga dengan birokrasi yang berlebihan;
- c. Tuntutan untuk mempertahankan keseimbangan antara kebutuhan akademik dan kebutuhan keagamaan dalam alokasi anggaran, terutama dalam konteks persaingan global dan perkembangan teknologi.

5. Implikasi kebijakan

Kebijakan pengelolaan anggaran yang efektif dan berkelanjutan di perguruan tinggi Islam dapat memiliki sejumlah implikasi positif, antara lain:

- a. Meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian yang berkaitan dengan Islam dan kebutuhan masyarakat secara umum;
- b. Mendukung pengembangan lembaga sebagai pusat pembelajaran dan pengembangan komunitas Muslim yang berdampak positif pada masyarakat luas;
- c. Memperkuat citra dan reputasi perguruan tinggi Islam sebagai lembaga yang profesional dan bertanggung jawab.

Dalam menyusun kebijakan pengelolaan anggaran, penting bagi perguruan tinggi Islam untuk melibatkan berbagai *stakeholder*, termasuk pimpinan, dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya. Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan dapat mencerminkan kebutuhan dan aspirasi semua pihak serta menghasilkan dampak yang positif bagi pengembangan pendidikan tinggi Islam di Indonesia.

METODOLOGI

Metode penulisan yang digunakan pada *policy paper* ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan pada kajian literatur, yaitu dengan mengandalkan berbagai sumber bacaan untuk mendapatkan informasi. Metode kualitatif diterapkan, karena data yang dihimpun berupa kata-kata atau deskripsi. Tinjauan literatur merupakan jenis kajian yang terutama menggunakan sumber-sumber pustaka.

Penulis menghimpun berbagai literatur terkait kebijakan anggaran perguruan tinggi dan melakukan observasi.

Objek kajian dianalisis dengan memanfaatkan berbagai sumber Pustaka, seperti: buku, jurnal ilmiah, data digital, dokumen, dan lainnya.

Kajian pustaka memiliki ciri khas tersendiri, di mana penulis menghadapi data yang tidak langsung diperoleh dari lapangan. Data umumnya berfungsi sebagai sumber sekunder dan bukan merupakan data primer yang diperoleh langsung dari sumber aslinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan

Pengelolaan anggaran yang berbasis akreditasi merupakan strategi penting dalam memastikan perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitasnya secara berkelanjutan. Namun dalam konteks IAIN Kendari, terdapat permasalahan terkait kurangnya dasar regulasi yang mengatur pengusulan anggaran berorientasi pada peningkatan akreditasi.

Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi kondisi penganggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari, fokus pada mekanisme pengusulan anggaran, kurangnya regulasi yang mengatur hal tersebut, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas perguruan tinggi. Analisis ini didasarkan pada referensi dari literatur terkait pengelolaan anggaran berbasis akreditasi dan praktik terbaik di perguruan tinggi.

Saat ini, perguruan tinggi dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, salah satunya melalui peningkatan akreditasi program

studi dan institusi. Pengelolaan anggaran yang berbasis akreditasi menjadi strategi yang penting dalam mendukung upaya ini. Dengan mengalokasikan dana secara tepat untuk mendukung kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian standar akreditasi, perguruan tinggi dapat memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Menurut Ronald E. Ehrenberg (Ehrenberg, 2007; 25-28), dasar-dasar penyusunan anggaran di perguruan tinggi mencakup beberapa langkah penting, yaitu:

1. Perencanaan strategis, yaitu menelaraskan anggaran dengan rencana strategis jangka panjang perguruan tinggi;
2. Keterlibatan *stakeholder*, yaitu pelibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk fakultas, staf, dan mahasiswa dalam proses penyusunan anggaran;
3. Analisis kebutuhan, yaitu pengidentifikasian kebutuhan akademik dan operasional yang mendesak dan masa depan.

Pimpinan IAIN Kendari memiliki harapan bahwa pengusulan anggaran oleh fakultas, lembaga, dan unit kampus harus berbasis atau berorientasi pada peningkatan akreditasi. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya mengalokasikan dana secara strategis untuk mendukung upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui peningkatan akreditasi.

Sejatinya, IAIN Kendari telah memiliki kebijakan anggaran berbasis akreditasi namun masih belum optimal akibat perangkat pendukung kebijakan tersebut belum tersedia secara komprehensif. Kebijakan tersebut didasarkan pada fakta bahwa dari 23 program studi (prodi),

baik pada program sarjana maupun pascasarjana baru terdapat 1 (satu) prodi yang memperoleh akreditasi “Unggul (A)”, bahkan masih ada 3 (tiga) prodi yang masih berstatus akreditasi “C”. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Daftar Akreditasi Prodi IAIN Kendari

| No | Prodi | Peringkat Akreditasi |
|----|-------------------------------------------|----------------------|
| 1 | Pendidikan Agama Islam | A |
| 2 | Manajemen Pendidikan Islam | B |
| 3 | Pendidikan Bahasa Arab | Baik Sekali |
| 4 | Pendidikan Guru Raudlatul Athfal | B |
| 5 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | B |
| 6 | Pendidikan Bahasa Inggris | C |
| 7 | Tadris Ilmu Pendidikan Alam | Baik |
| 8 | Tadris Matematika | Baik Sekali |
| 9 | Tadris Biologi | Baik Sekali |
| 10 | Tadris Fisika | Baik Sekali |
| 11 | Ahwal Al-Syakhshiyah | B |
| 12 | Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | B |
| 13 | Hukum Tatanegara | B |
| 14 | Perbankan Syariah | B |
| 15 | Ekonomi Syariah | B |
| 16 | Bimbingan dan Penyuluhan Islam | B |
| 17 | Komunikasi Penyiaran Islam | B |
| 18 | Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Baik Sekali |
| 19 | Manajemen Dakwah | Baik |
| 20 | S2. Manajemen Pendidikan Islam | Baik Sekali |
| 21 | S2. Pendidikan Agama Islam | Baik Sekali |
| 22 | S2. Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhshiyah) | C |
| 23 | S2. Ekonomi Syariah | C |

Sumber: Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Kendari bulan Maret Tahun 2024.

Berdasarkan tabel di atas, maka kebijakan anggaran berbasis akreditasi menjadi keniscayaan untuk mendapat perhatian serius dikarenakan belum didukung oleh dasar regulasi yang memadai. Tidak

adanya Surat Keputusan Rektor, pedoman, petunjuk teknis, atau regulasi lainnya yang secara jelas mengatur pengusulan anggaran berbasis akreditasi menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Kurangnya dasar regulasi menyebabkan proses pengusulan anggaran cenderung tidak terstruktur dan tidak konsisten. Selama ini, pengusulan anggaran di IAIN Kendari dilakukan melalui rapat kerja dan pengusulan Rencana Kerja Anggaran Kegiatan Lembaga (RKAKL) oleh setiap fakultas, lembaga, dan unit kampus berdasarkan hasil rapat kerja internal masing-masing fakultas, lembaga, dan unit kampus.

RKAKL ini mencantumkan Terms of Reference (TOR) kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan. Namun, pengusulan anggaran tidak secara khusus berorientasi pada peningkatan akreditasi, atau dalam kata lain tidak ada penekanan pada TOR setiap program kerja yang diusulkan secara jelas. TOR hanya terdiri dari latar belakang kegiatan, dasar hukum, maksud dan tujuan, nama/waktu/tempat pelaksanaan, mekanisme dan rancangan kegiatan, sasaran kegiatan, dan estimasi biaya.

Setelah pengusulan anggaran dilakukan, RKAKL kemudian dianalisis oleh Tim Perencana Keuangan dan Satuan Pengawas Internal kampus. Namun tidak melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu yang seharusnya memiliki peran penting dalam pengendalian mutu kampus. Keterlibatan lembaga ini penting, karena setiap tahun dilakukan audit mutu internal yang dapat mengidentifikasi langkah-langkah yang harus diambil oleh setiap program studi untuk meningkatkan akreditasinya serta secara detail dalam lembar hasil temuan

audit diuraikan berbagai aspek yang harus dilakukan pada setiap program studi untuk meningkatkan akreditasinya sesuai dengan rekomendasi yang diajukan oleh auditor mutu internal kampus, yang dibahas di dalam rapat tinjauan manajemen yang dilakukan setiap tahun.

Selain itu, kurangnya dasar regulasi yang mengatur pengusulan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari memiliki beberapa implikasi yang signifikan, antara lain:

1. Tidak tercapainya tujuan strategis. Ketidajelasan dalam pengaturan penganggaran berbasis akreditasi dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan strategis perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas dan daya saingnya melalui peningkatan akreditasi. Tanpa arahan yang jelas, fakultas, lembaga, dan unit kampus mungkin kurang memperhatikan aspek-aspek yang relevan dengan proses akreditasi dalam pengusulan anggaran mereka;
2. Potensi penggunaan dana yang tidak efektif. Kurangnya pengalokasian dana yang terarah dan strategis untuk mendukung peningkatan akreditasi dapat mengakibatkan penggunaan dana yang tidak efektif. Tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas, risiko pemborosan atau penggunaan dana yang tidak optimal menjadi lebih besar;
3. Tidak terjadinya sinergi antara pengelolaan anggaran dan penjaminan mutu. Tidak melibatkan Lembaga Penjaminan Mutu dalam proses analisis dan evaluasi anggaran dapat mengakibatkan kurangnya sinergi

antara pengelolaan anggaran dan upaya peningkatan mutu akademik. Keterlibatan lembaga ini penting untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran mendukung upaya-upaya peningkatan kualitas yang terukur dan terarah.

Alternatif Kebijakan

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang terjadi dan memastikan pengelolaan anggaran yang berbasis akreditasi dapat berjalan efektif di IAIN Kendari, berikut beberapa alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan:

1. Mensinergikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rektor dengan kebijakan anggaran berbasis akreditasi
Dalam buku "Budgeting for Managers", Sid Kemp dan Eric Dunbar (Kemp & Dunbar, 2003) menjelaskan bahwa pengajuan proposal anggaran harus mencakup justifikasi yang jelas mengenai bagaimana setiap item anggaran mendukung pencapaian kinerja lembaga. Hal ini berarti setiap fakultas, lembaga, dan unit kerja harus menunjukkan bagaimana dana yang diajukan akan digunakan untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan indikator akreditasi yang ditetapkan. Sinergi antara IKU Rektor dengan kebijakan anggaran berbasis akreditasi memiliki implikasi yang sangat penting dalam memastikan efektivitas dan keselarasan antara tujuan strategis Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) dan alokasi sumber daya keuangannya. IKU biasanya mencakup sejumlah indikator kinerja yang berkaitan dengan pencapaian tujuan strategis institusi pendidikan tinggi, seperti

tingkat kelulusan, tingkat keterlibatan mahasiswa, penelitian dan pengabdian masyarakat, dan reputasi lembaga.

Sinergi antara IKU dan kebijakan anggaran berbasis akreditasi memastikan bahwa alokasi anggaran mencerminkan prioritas strategis tersebut. Dengan kata lain, sumber daya dialokasikan dengan tepat untuk mendukung pencapaian tujuan utama institusi. Dengan adanya sinergitas tersebut, pemangku kepentingan memiliki gambaran yang jelas tentang bagaimana alokasi sumber daya keuangan terkait langsung dengan pencapaian tujuan strategis lembaga.

Hal tersebut meningkatkan tingkat akuntabilitas, karena pemangku kepentingan dapat melihat secara langsung hubungan antara kinerja keuangan dan kinerja strategis lembaga. IKU biasanya didukung oleh data dan informasi yang akurat dan terukur, sehingga pengambilan keputusan terkait alokasi sumber daya dapat didasarkan pada data dan informasi yang sama. Hal tersebut untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil lebih objektif dan terinformasi, karena didukung oleh analisis data yang komprehensif.

Selain itu, memungkinkan pula lembaga untuk mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk mencapai tujuan strategisnya. Dengan menyesuaikan alokasi anggaran dengan prioritas strategis, lembaga dapat memaksimalkan dampak dari setiap yang diinvestasikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya.

Dengan melibatkan indikator kinerja yang berkaitan dengan penelitian,

pengabdian kepada masyarakat, dan kualitas pendidikan, sinergi antara IKU dan kebijakan anggaran berbasis akreditasi dapat mendorong inovasi dan peningkatan kualitas institusi.

Alokasi sumber daya yang tepat dapat mendukung pengembangan program-program unggulan, investasi dalam fasilitas dan infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia.

Samuel C. Weaver dan J. Fred Weston (Weaver; & Weston, 2007; 220-225) menekankan pentingnya strategi pengendalian biaya dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Institusi harus menerapkan praktik pengendalian biaya yang ketat dan mencari cara untuk meningkatkan efisiensi operasional. Ini akan membantu memastikan bahwa sumber daya yang dialokasikan untuk mencapai IKU Rektor digunakan secara optimal dan sesuai dengan standar akreditasi

2. Penyusunan regulasi yang jelas

Pimpinan IAIN Kendari perlu segera mengeluarkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pengusulan anggaran berbasis akreditasi. Surat Keputusan Rektor, pedoman, atau petunjuk teknis harus menyediakan panduan yang jelas tentang mekanisme, kriteria, dan prioritas dalam pengalokasian dana untuk mendukung peningkatan akreditasi.

Regulasi ini penting adanya sebagai rujukan bersama dalam melaksanakan kebijakan (Larasati et.al., 2018). Hal tersebut dikarenakan, pimpinan IAIN Kendari memiliki peran krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi kebijakan anggaran berbasis akreditasi.

Salah satu langkah penting yang perlu diambil oleh pimpinan adalah mengeluarkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pengusulan anggaran berbasis akreditasi. Regulasi ini akan menjadi pedoman bagi seluruh unit di IAIN Kendari dalam menyusun, mengelola, dan melaporkan pengusulan anggaran dengan mempertimbangkan standar dan kriteria akreditasi yang telah ditetapkan.

Regulasi yang jelas dan komprehensif akan memberikan kepastian kepada seluruh unit di IAIN Kendari tentang prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengusulan anggaran berbasis akreditasi. Hal ini dapat mengurangi kebingungan dan kesalahpahaman dalam mengelola anggaran.

Dengan adanya regulasi yang jelas, pimpinan dapat menetapkan standar yang harus dipatuhi oleh setiap unit di lembaga. Hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan mendorong transparansi dalam penggunaan dana akreditasi. Regulasi yang komprehensif akan memastikan bahwa setiap pengusulan anggaran berbasis akreditasi memenuhi standar dan kriteria yang ditetapkan oleh badan akreditasi. Hal ini penting untuk memastikan keberlangsungan akreditasi lembaga dan meningkatkan kualitas pendidikan yang diselenggarakan.

3. Pelibatan Lembaga Penjaminan Mutu
Lembaga Penjamin Mutu (LPM) memiliki fungsi penting dalam memastikan bahwa Lembaga Pendidikan Tinggi (LPT) memenuhi standar kualitas yang ditetapkan, baik

secara internal maupun oleh badan akreditasi atau regulator eksternal.

Peran LPM mencakup pemantauan, evaluasi, dan pengembangan kebijakan untuk memastikan bahwa proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan (Abdurrahmansyah & Rismawati, 2022).

LPM harus secara aktif dilibatkan dalam proses analisis dan evaluasi anggaran untuk memastikan adanya konsistensi antara pengelolaan anggaran dan upaya peningkatan mutu akademik. Audit mutu internal yang dilakukan oleh lembaga ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan dan prioritas dalam pengalokasian dana.

4. Peningkatan kesadaran dan pelatihan
Peningkatan kesadaran dan pelatihan bagi fakultas, lembaga, dan unit kampus tentang pentingnya pengelolaan anggaran berbasis akreditasi dapat membantu memperkuat komitmen dalam melaksanakan kebijakan ini. Workshop, seminar, atau pelatihan yang fokus pada konsep dan praktik terbaik dalam pengelolaan anggaran berbasis akreditasi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh *stakeholders*.
5. Pemantauan dan evaluasi berkelanjutan
Pimpinan IAIN Kendari harus melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan pengelolaan anggaran berbasis akreditasi. Evaluasi ini harus mencakup penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, dan dampak dari penggunaan dana yang dialokasikan

untuk mendukung peningkatan akreditasi.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa perguruan tinggi saat ini dihadapkan pada tuntutan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing, salah satunya melalui peningkatan akreditasi program studi dan institusi. Pengelolaan anggaran yang berbasis akreditasi menjadi strategi yang penting dalam mendukung upaya ini. Dengan mengalokasikan dana secara tepat untuk mendukung kegiatan yang berkontribusi pada pencapaian standar akreditasi, perguruan tinggi dapat memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang dimiliki.

Pengelolaan anggaran berbasis akreditasi di IAIN Kendari menghadapi tantangan signifikan karena kurangnya dasar regulasi yang mengatur proses ini. Tanpa arahan yang jelas, pengalokasian dana untuk mendukung peningkatan akreditasi dapat menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Untuk memastikan efektivitas kebijakan pengelolaan anggaran berbasis akreditasi, diperlukan langkah-langkah konkret, seperti: sinergitas indikator kinerja utama institusi, pembuatan regulasi yang jelas, pelibatan aktif Lembaga Penjaminan Mutu, peningkatan kesadaran dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, IAIN Kendari dapat lebih efektif dalam mengalokasikan sumber daya untuk mendukung upaya peningkatan kualitas perguruan tinggi melalui peningkatan akreditasi.

Rekomendasi

Berikut ini beberapa rekomendasi yang dapat diajukan terkait dengan peningkatan efektivitas implementasi kebijakan anggaran berbasis akreditasi pada perguruan tinggi Islam:

1. Menteri Agama RI dan Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI memastikan adanya sinergitas antara Indikator Kinerja Utama Rektor dibawah naungan Kementerian Agama RI dengan kebijakan anggaran berbasis akreditasi setiap perguruan tinggi melalui rencana strategis dan penandatanganan perjanjian kinerja;
2. Rektor IAIN Kendari menerbitkan regulasi yang jelas dan komprehensif mengenai pengusulan anggaran berbasis akreditasi. Regulasi tersebut dapat berupa Surat Keputusan Rektor, pedoman, atau petunjuk teknis harus menyediakan panduan yang jelas tentang mekanisme, kriteria, dan prioritas dalam pengalokasian dana untuk mendukung peningkatan akreditasi. Regulasi ini penting adanya sebagai rujukan bersama dalam melaksanakan kebijakan;
3. Rektor IAIN Kendari melibatkan secara aktif Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) dalam proses analisis dan evaluasi anggaran untuk memastikan adanya konsistensi antara pengelolaan anggaran dan upaya peningkatan mutu akademik. Audit mutu internal yang dilakukan oleh lembaga ini dapat menjadi dasar yang kuat dalam menentukan kebutuhan dan prioritas dalam pengalokasian dana.
4. Rektor IAIN Kendari secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan

anggaran berbasis akreditasi. Evaluasi ini perlu mencakup penilaian terhadap kinerja efektif, efisiensi, serta dampak dari penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk mendukung upaya peningkatan akreditasi.

REFERENSI

- Abdurrahmansyah & Rismawati, I. (2022). "Peningkatan Kualitas Perguruan Tinggi Melalui Sistem Penjamin Mutu dengan Pendekatan *Total Quality Management*". *Jurnal Perspektif*, 6(2), 154–169. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jp.v6i2.177>
- Ariani, D. (2017). "Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi BHMN Harus Patuhi Aturan". *Journal FKIP UNS*. <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/snpe/article/view/10697/8374>
- Arifin, I., Juharyanto, Mustiningsih, & Taufiq, A. (2018). "Islamic Crash Course as a Leadership Strategy of School Principals in *Strengthening School Organizational Culture*". *SAGE Open*, 8(3). <https://doi.org/10.1177/2158244018799849>
- Ehrenberg, R. G. (2007). *Financial Management in Higher Education*. USA: Cornell University Press.
- Frinosta, E., Defit, S., & Sumijan. (2021). "Optimalisasi Penggunaan Anggaran dalam Menunjang Proses Tri Darma Pendidikan pada Perguruan Tinggi". *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 3, 83–88. <https://doi.org/10.37034/infv3i3.78>
- Hadi, H. (2016). "Kebijakan Pendidikan Nasional Terhadap Pendidikan Islam dan Pendidikan Sekuler". *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 40(2), 390–409. <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.304>
- Indri Febrianti, M. S. (2023). "Peran Akreditasi dalam Meningkatkan Mutu Layanan di Lembaga Pendidikan". *JUMPIS : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1), 11–23. <http://e-journal.iainfmpapua.ac.id/index.php/jumpis>
- Jaenuddin, Arif, M. N. R. Al, & Ihsani, I. F. (2022). "Implementasi Kebijakan Tata Kelola Pembiayaan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri". *Jurnal Perspektif*, 6(1), 62–73. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15575/jp.v6i1.167>
- Kemp, S., & Dunbar, E. (2003). *Budgeting for Managers*. USA: McGraw-Hill.
- Larasati, R., Asnawi, M., Hafizrianda, Y., Akuntansi, P. M., & Cenderawasih, U. (2018). "Analisis Penerapan *Good University Governance* pada Perguruan Tinggi di Kota Jayapura". 2(2), 304–323.
- Weaver, S. C., & Weston, J. F. (2007). *Strategic Financial Management: Applications of Corporate Finance*. Cengage Learning.
- Yulianingsih, Y. (2016). "Manajemen Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi". *Al-Idarah Kependidikan Islam*, 5(1), 93.

